

## **DAYA LENTING PEREMPUAN KEPALA KELUARGA DALAM MEMBANGUN KEAMANAN PANGAN KELUARGA DI ERA ADAPTASI KEBIASAAN BARU**

Indra Kertati

*Universitas 17 Agustus 1945 Semarang*  
Email : [indra-kertati@untagsmg.ac.id](mailto:indra-kertati@untagsmg.ac.id)

Haris Muzakky

*Universitas 17 Agustus 1945 Semarang*  
Email : [harismuzakky@yahoo.com](mailto:harismuzakky@yahoo.com)

Dadang Asriyadi

*Universitas 17 Agustus 1945 Semarang*  
Email : [dadang-asriyadi@untagsmg.ac.id](mailto:dadang-asriyadi@untagsmg.ac.id)

Titis kartikasari handayani,

*Universitas 17 Agustus 1945 Semarang*  
Email : [kartikasari\\_kenthis@yahoo.com](mailto:kartikasari_kenthis@yahoo.com)

Fajar Hanung Basworo

*Universitas 17 Agustus 1945 Semarang*  
Email : [morningglorykid@yahoo.com](mailto:morningglorykid@yahoo.com)

### **Abstrak**

New normal yang tengah berlangsung, menyisakan banyak pekerjaan rumah baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat. New normal adalah bagaimana meningkatkan kualitas hidup dengan menguatkan kapasitas imun tubuh dengan konsumsi makanan sehat dan berbagai anjuran yang telah dirumuskan dalam kebijakan pemerintah. Bagi perempuan kepala keluarga atau Kepala Rumah Tangga (KRT) perempuan miskin new normal berbeda dengan kondisi normal. Mereka memiliki permasalahan aksesibilitas dalam menyediakan pangan yang aman karena ketrampilan dan pendidikan yang dimiliki tidak mencukupi. Era baru ini bagi (KRT) perempuan miskin terlampau berat. Hasil penelitian menunjukkan daya lenting KRT perempuan miskin terhalang oleh identitas hukum yang tidak dimiliki pasca perceraian dengan suaminya. Identitas hukum yang akan memberikan landasan bagi perempuan mengakses kesempatan tertutup, karena perempuan miskin tidak mengerti bahwa identitas hukum menjadi syarat dalam mengakses bantuan program-program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah. Beruntungnya para KRT perempuan miskin ini memiliki kemampuan daya lenting yang sangat baik untuk mempertahankan keamanan pangan bagi keluarganya. Daya lenting yang dilakukan lebih berat saat ini dibandingkan dengan krisis moneter tahun 1989-1999, karena mereka harus bersaing dengan banyak pihak yang lebih menguasai teknologi informasi. Tujuan penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis kapasitas KRT perempuan miskin dalam membangun keamanan pangan. Lokus penelitian ini di Kota Surakarta karena KRT perempuan miskin di kota ini merupakan perempuan yang memiliki ketangguhan yang teruji di beberapa kali bencana yang pernah terjadi di kota ini waktu lampau. Rekomendasi hasil penelitian ini ditujukan kepada pemerintah Kota Surakarta agar menyusun strategi afirmatif yang berbeda untuk menguatkan ketahanan dan keamanan pangan keluarga khususnya bagi KRT perempuan miskin.

**Kata kunci** : perempuan, miskin, lenting, pandemic, covid-19, adaptasi kebiasaan baru, keamanan, pangan.

## PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 belum berakhir. Data tumbuh, tumbang dan berkembang terus terpantau oleh Satgas Covid di seluruh Dunia. Tercatat peta persebaran 14 hari terakhir Oktober 2020 kasus telah mencapai 45,9 juta dengan meninggal dunia sebanyak 1,19 juta. Indonesia jumlah kasus terkonfirmasi sebanyak 410,088, sebanyak 58,418 termasuk kategori kasus aktif atau 14.2 persen dari terkonfirmasi. Sebanyak 337,801 dinyatakan sembuh atau 82.4 persen dari terkonfirmasi dan 13,869 atau 3.4 persen dari terkonfirmasi meninggal dunia <sup>(1)</sup>.

Provinsi Jawa Tengah termasuk daerah merah nomor 4 di Indonesia. Total terkonfirmasi sampai dengan akhir oktober adalah 35.126 dengan suspek 3.955, dirawat sebanyak 3.784 pasien, sembuh 28.741 dan meninggal dunia 2061 jiwa <sup>(2)</sup>.

Covid-19 nampaknya tidak akan pernah sirna, setidaknya prediksi Ilmuwan ilmuwan *University of Minnesota* mengungkap tiga model sebagaimana termuat <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5069316/kapan-corona-berakhir-ini-prediksi-para-ahli> tanggal 26 Juni 2020. Skenario pertama adalah serangkaian gelombang kecil secara berulang yang disebut sebagai *peaks and valleys*, disusul scenario kedua yang disebut sebagai *fall peak* yaitu scenario terburuk terjadi di belahan bumi utara pada musim gugur September hingga desember 2020, yang dianggap mirip dengan flu Spanyol yang terjadi 1918-1919 dengan makin banyaknya orang yang terjangkit tanpa gejala. Skenario ketiga adalah *slow burn* atau penurunan secara lambat. Skenario ketiga ini oleh Dr *Jeremy Greene* dari *Johns Hopkins University* disebut sebagai perspektif sosial, yaitu berakhirnya covid-19 bukan hilangnya virus, namun lebih pada kebosanan akibat tekanan yang terus menerus dari berbagai sisi, dan ingin mencoba hidup berdampingan dengan covid-19.

Dampak covid-19 yang dirasakan oleh seluruh dunia bukan hanya persoalan kesehatan saja namun yang juga dirasakan oleh masyarakat adalah kerentanan ekonomi, khususnya kelompok masyarakat miskin dan marginal. Prediksi kajian Smeru angka kemiskinan akan melonjak akibat covid-19 dan berakibat pada menurunnya pertumbuhan ekonomi secara nasional <sup>(3)</sup>. Catatan BPS pada Maret 2020 terdapat sebesar 9,78 persen penduduk miskin, meningkat 0,56 poin persentase terhadap September 2019 dan meningkat 0,37 poin persentase terhadap Maret 2019. Diperkirakan yang terpuruk adalah masyarakat miskin, termasuk mereka yang berada tepat di garis kemiskinan dan sedikit diatas garis kemiskinan. Berdasarkan hasil survei sosial demografi BPS, kelompok masyarakat lapisan bawah atau berpendapatan rendah, 70 persen mengaku mengalami penurunan pendapatan saat covid-19 melanda negeri ini <sup>(4)</sup>.

Kondisi inilah yang melahirkan berbagai program afirmatif untuk kelompok masyarakat miskin terdampak seperti bantuan langsung untuk masyarakat miskin atau bantuan tunai untuk pelaku UMKM. Upaya ini akan menjadi pemantik agar daya beli masyarakat meningkat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menyadari bahwa pandemi Covid-19 ini berbeda dengan pandemi lainnya. Selain cepat, pandemi telah meluluhlantakkan sendi-sedi ekonomi masyarakat ekonomi lemah.

Keterpurukan ekonomi masyarakat lapisan bawah ini sangat berbeda dengan kondisi krisis ekonomi tahun 1998. Krisis yang terjadi saat itu mampu menjadikan UMKM sebagai *backbone* dan *buffer zone* yang menyelamatkan ekonomi bangsa meskipun belum signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Pasca krisis tahun 1997-1998 jumlah UMKM tidak mengalami pengurangan melainkan meningkat, tercatat pada tahun 1997 terdapat sebanyak 39.765.110, menurun tahun 1998 sebesar sebesar 7,42 persen namun tahun 1999 sudah naik 2,98 persen menjadi 37.911.723 dan tumbuh cepat tahun 2000 menjadi 4,94 persen atau 39.784.036 UMKM <sup>(5)</sup>.

*The World Trade Organisation (WTO)* memperkirakan bahwa volume perdagangan dunia secara global kemungkinan akan menurun sekitar 32 persen pada tahun 2020 selama masa COVID-19. Pembatasan aktivitas masyarakat sebagai upaya penanganan pandemi COVID-19 telah menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan secara nasional. Beberapa sektor yang terpuruk adalah transportasi, pariwisata, perdagangan, dan sektor rumah tangga. UMKM menghasilkan lapangan kerja antara 50-95 persen, dan berkontribusi antara 30-50 persen terhadap GDP<sup>(6)</sup>.

Perempuan memiliki persoalan khusus yang berbeda dengan laki-laki. Sama-sama terpuruk oleh covid-19, namun perempuan memiliki beban lebih yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Masa Pandemi, perempuan bukan hanya harus menjaga kesehatan dan keselamatan anak-anak dan keluarga, namun termasuk melakukan pengasuhan yang lebih besar dibandingkan masa normal. Perempuan memiliki beban ganda yaitu beban domestik dan publik. Beban domestik adalah beban rumah tangga yang sering secara keliru dianggap sebagai kodrat, padahal sesungguhnya hanya konstruksi sosial yang dianggap benar namun salah. Pada kelompok miskin beban domestik bertambah dengan beban publik yaitu mencari nafkah baik tambahan ataupun nafkah utama.

Pada kelompok rentan yaitu perempuan sebagai kepala keluarga, suka tidak suka harus menjalankan dua kutub domestik dan publik secara tarik menarik. Memperkuat dan mempertahankan ketersediaan pangan yang layak menjadi pilihan yang tidak dapat ditolak. Sementara bantuan yang diharapkan akan meringankan beban belum mampu diakses. Mereka rentan karena beberapa sebab antara lain identitas hukum sebagai kepala keluarga tidak dapat dimiliki akibat talak yang tidak terdaftar di catatan sipil maupun di Pengadilan Agama. Sisi lain perempuan KK harus memiliki identitas kartu keluarga sehingga hak atas bantuan pemerintah dapat dinikmati.

Kebijakan adaptasi kebiasaan baru telah diluncurkan, dengan harapan terjadi kesadaran masyarakat bahwa pandemi yang belum dapat dihentikan ini mampu untuk diadaptasi dengan protokol kesehatan yang baik, serta memenuhi himbauan untuk tetap menjaga jarak dan bersentuhan dengan orang lain. Ini bukan persoalan sederhana. Kelelahan sosial akibat pandemi telah merentangkan jarak dalam sektor ekonomi. Para pekerja kantor memiliki stabilitas kerja yang lebih baik, sementara para pelaku ekonomi kecil harus berjuang karena era adaptasi perubahan baru belum mampu untuk diterobos dalam menguatkan ekonomi rumah tangga. Daya lenting melemah, karena harus bersaing dengan tataran baru yang semakin menguat yaitu konsumsi berbasis teknologi informasi. Ketidakberdayaan bertubi-tubi ini berakibat pada kerentanan yang makin panjang.

Memperhatikan fenomena sebagaimana tersebut di atas peneliti melakukan analisis terhadap kemampuan KRT perempuan miskin dalam mempertahankan keamanan, ketersediaan dan kualitas pangan bagi keluarga. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis perempuan kepala keluarga dalam membangun keamanan pangan di masa adaptasi perubahan baru. Lokus penelitian ini di Kota Surakarta karena perempuan kepala keluarga di Kota Surakarta merupakan perempuan yang memiliki keuletan dan ketangguhan yang teruji di beberapa kali bencana yang melanda kota ini.

Perempuan sebagai kepala keluarga dalam membangun ketahanan pangan bukan merupakan persoalan yang mudah. Sebagai perempuan dengan identitas kepala keluarga telah dikonstruksi secara sosial bahwa mereka lemah, dan tidak berdaya menghadapi pandemi covid-19 dari berbagai arah. Pandemi kali ini dianggap musibah yang sangat berat. Beban berat yang

dipukul para Kepala Rumah Tangga (KRT) Perempuan, memaksa mereka untuk keluar dari situasi menghimpit yang belum ketahuan kapan akan berakhir.

Era adaptasi kebiasaan baru sudah lama diluncurkan. Masyarakat dapat melakukan aktivitas produktif dalam menguatkan jaringan usaha yang digeluti. Era ini menjadi pertarungan apakah gap yang selama ini terjadi dapat diminimalisir sehingga *optimum goal* dapat tercapai.

Kepala Rumah Tangga (KRT) Perempuan Miskin di Kota Surakarta sebagian besar memiliki usaha mikro hingga kecil dengan berbagai komoditas bergerak maju mengembangkan kelentingan yang selama ini dimiliki. Persoalan yang dihadapi adalah konstruksi yang menjadi dasar membangun usaha tidak sekuat saat krisis ekonomi. Masyarakat beralih model dalam memperoleh kebutuhan, sementara para pengusaha mikro dan kecil masih konvensional memasarkan barang dagangannya secara terbuka. Distorsi inilah yang belum dipahami banyak pihak yang memicu pertumbuhan ekonomi yang lambat dan daya dobrak yang lemah. Persoalan yang mengemuka adalah bagaimana kemampuan melakukan lompatan-lompatan kecil dalam menghadapi era adaptasi kebiasaan baru agar keamanan pangan keluarga dapat terjamin baik ketersediaan maupun kualitasnya.

## **METODE**

Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian deskriptif adalah mendeskripsikan suatu fenomena dan karakteristiknya. Penelitian ini lebih mementingkan apa daripada bagaimana atau mengapa sesuatu terjadi. Oleh karena itu, alat observasi dan survei sering digunakan untuk mengumpulkan data (Gall, Gall, & Borg, 2007). Penelitian kualitatif lebih holistik dan sering kali melibatkan kumpulan data yang kaya dari berbagai sumber untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang peserta individu, termasuk pendapat, perspektif, dan sikap mereka. Penelitian kualitatif sering kali melibatkan eksplorasi data secara induktif untuk mengidentifikasi tema, pola, atau konsep yang berulang dan kemudian menjelaskan dan menafsirkan kategori tersebut <sup>(7)</sup>.

Penelitian ini selain hendak menggambarkan situasi dan kondisi para kepala keluarga perempuan menghadapi pandemik covid-19 juga menganalisis kemampuan daya lenting mereka untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga. Subyek penelitian ini adalah Kepala Rumah Tangga (KRT) Perempuan Miskin di Kota Surakarta. Jenis data yang dipergunakan adalah data primer berupa hasil wawancara mendalam dengan subyek penelitian dan data sekunder berupa terbitan khusus baik dari BPS maupun dari Organisasi Perangkat Daerah yang relevan.

Subyek penelitian ini adalah KRT perempuan miskin dilihat dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan ciri-ciri, yaitu Kepala Rumah Tangga Perempuan dengan Status Kesejahteraan 40% Terendah (Desil 1-4). Jumlah subyek penelitian sebanyak 61 Kepala Rumah Tangga (KRT) Perempuan miskin.

Pengumpulan data dilakukan dengan indepth interview, yaitu melakukan wawancara dengan subyek penelitian, mendalami kisah atau kasus dan cerita dari kehidupan yang dijalannya. Melengkapi wawancara mendalam dilakukan observasi dari aktivitas para subyek penelitian. Pengolahan data dilakukan dengan cara triangulasi yang didasarkan pada asumsi penggunaan beberapa sumber: data, metode dan peneliti yang dapat menetralkan bias penelitian yang melekat dalam satu sumber data tertentu. Metode triangulasi menawarkan mengatasi kelemahan dari metode tunggal. Penggunaan deskriptif kualitatif memungkinkan menggunakan beberapa metode yang berbeda untuk menyelidiki fenomena yang menarik dan hasilnya memberikan konfirmasi yang saling melengkapi, sehingga diperoleh hasil yang valid <sup>(8)</sup>.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kamus Bahasa Indonesia, lenting berarti kenyal, sedangkan daya lenting adalah sifat bahan yang kembali dengan sendirinya ke bentuk semula apabila meregang atau apabila penyangganya tidak bekerja lagi. Dalam *Oxford Dictionary* kata lenting diartikan sebagai *reliance* atau sesuatu untuk dapat bertahan hidup. Kata daya lenting sering banyak digunakan pada pembahasan kapasitas masyarakat dalam menghadapi perubahan lingkungan.

Keamanan pangan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Dalam UU ini juga didefinisikan tentang kemandirian dan keamanan pangan.

Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan<sup>(9)</sup>.

Ketiga konsep dasar ini diperlukan untuk memahami tentang pangan secara komprehensif. Dalam hal kemandirian pangan menempatkan ketersediaan beras sebagai konsumsi utama masyarakat menjadi komoditas yang berperan dalam memenuhi mata pencaharian masyarakat karena (1) beras merupakan sumber utama karbohidrat sebagian besar masyarakat Indonesia dan hampir 90 persen dari total penduduk Indonesia mengkonsumsi beras, (2) sebagian besar mata pencaharian masyarakat Indonesia bercocok tanam sehingga penyediaan sawah yang pekerjaannya paling besar adalah sektor tanaman pangan (3) Total pengeluaran rumah tangga miskin sebanyak 30 persen digunakan untuk konsumsi beras (4) dalam hal Kesehatan, AKG (Angka Kecukupan Gizi) kelompok biji-bijian adalah 50 persen dari total konsumsi energi kelompok pangan. Oleh karenanya ketersediaan beras nasional bergantung pada 3 aspek, yaitu: produksi beras dalam negeri; pengadaan cadangan beras melalui Bulog; dan kebijakan pengadaan beras dari luar negeri<sup>(10)</sup>.

Kemandirian pangan untuk menjaga kelangsungan produksi beras dalam negeri, melindungi petani agar hasil panen terdistribusi, menjamin harga bagi petani dan kemudahan akses beras di masyarakat. Menurut FAO (2015), Indonesia termasuk di antara beras terbesar ketiga negara penghasil di dunia setelah China dan India. Produksi beras Cina sebesar 741 juta ton, di India sebesar 153 juta ton sedangkan beras produksi di Indonesia sebesar 75,6 juta ton. Memperhatikan kondisi ini upaya yang harus dilakukan adalah swasembada beras sehingga dalam negeri kebutuhan tidak tergantung pada produk luar negeri yaitu: (1) dari sisi penawaran mendorong peningkatan produksi beras dalam negeri dengan menerapkan teknologi tepat guna, dan (2) dari sisi permintaan yaitu menggalakkan kampanye “*one day no rice*” melalui pangan. kegiatan diversifikasi<sup>(10)</sup>.

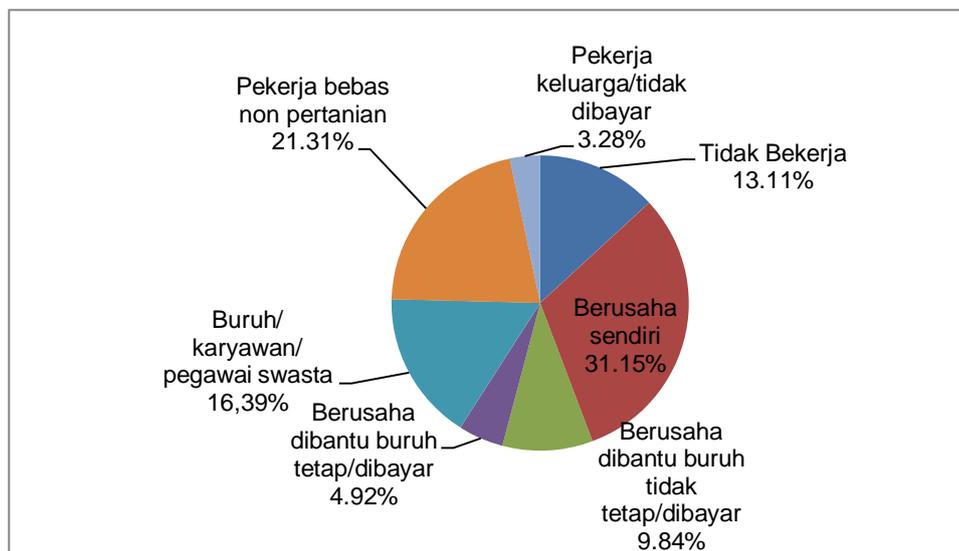
Keamanan pangan berkelanjutan didefinisikan sebagai ketika semua orang setiap saat memiliki fisik, akses sosial dan ekonomi yang cukup, makanan yang aman dan bergizi yang memenuhi kebutuhan diet dan preferensi makanan mereka hidup aktif dan sehat tanpa mengurangi kapasitas produktif alam sumber daya, integritas sistem biologis, atau kualitas

lingkungan . Deklarasi Roma tahun 1996 tentang Ketahanan Pangan dan KTT Pangan Dunia *Plan of Action* mengakui bahwa meskipun ketersediaan pangan meningkat secara substansial selama dekade terakhir, kendala serius dalam akses ke makanan, ditambah dengan ketidakmampuan rumah tangga untuk membeli makanan, ketidakstabilan pasokan dan permintaan dan bencana alam dan yang disebabkan oleh manusia, mencegah banyak orang dari memenuhi kebutuhan pangan pokok mereka (FAO, 1996). Dalam konteks ini, Pangan Dunia 1996 KTT kembali menegaskan pentingnya pengentasan kemiskinan melalui partisipasi penuh perempuan dan laki-laki untuk mencapai ketahanan pangan berkelanjutan bagi semua<sup>(11)</sup> .

Peraturan Pemerintah nomor 86 tahun 2019 tentang keamanan pangan menyebutkan bahwa penyelenggaraan keamanan pangan dilakukan melalui: a. sanitasi pangan; b. pengaturan terhadap bahan tambahan pangan; c. pengaturan terhadap pangan produk rekayasa genetik; d. pengaturan terhadap iradiasi pangan; e. penetapan standar kemasan pangan; f. pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan; dan g. jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan<sup>(12)</sup>. PP tersebut lebih banyak mengatur penyelenggaraan keamanan dalam arti luas, dalam proses produksi besar untuk menjamin keamanan pangan secara luas dan bukan secara individu.

Era pandemic covid-19 yang sudah sampai tahap adaptasi kebiasaan baru memberikan tantangan baru berupa keamanan pangan bagi masyarakat. Keamanan pangan yang dimaksud adalah kemampuan menyediakan pangan yang terjangkau, murah, dan aman untuk keluarga. Tantangan baru ini bukan hanya untuk pemerintah, namun secara individu masyarakat dituntut untuk dapat memenuhi keamanan pangan bagi keluarga.

Era adaptasi kebiasaan baru masih dirasakan berat oleh masyarakat khususnya perempuan sebagai kepala keluarga miskin. Perempuan Kepala Keluarga miskin harus bekerja ekstra keras karena sebagian besar mereka adalah pekerja bebas non pertanian (21,31 %). Sementara yang lain adalah buruh/karyawan swasta (16,39%) dan 13,11% tidak bekerja sebagaimana Nampak pada gambar berikut.



Gambar 1 : Mata Pencaharian Perempuan KK Miskin Kota Surakarta  
Sumber : Diolah dari data primer

KRT perempuan miskin memang mendapatkan bantuan dari pemerintah, namun tidak semua mendapatkan. Terdapat 96,72 persen KRT perempuan miskin yang diwawancarai mendapatkan bantuan sosial dan 3,28 persen tidak mendapatkan bantuan sosial. Jenis bantuan yang diperoleh adalah Program Indonesia Pintar sebesar 32,58 persen ; BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) sebesar 31,82 persen; serta Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar 28,03 persen. Penerimaan bantuan ini sifatnya tidak tumpang tindih. Mereka bisa mendapatkan bantuan salah satu atau salah dua, namun yang diterima tidak mencukupi kebutuhan hidup.

Diantara bantuan yang diterima, beras miskin atau raskin merupakan bantuan yang dirasakan banyak manfaat, meskipun jumlah yang diterima tidak utuh sebagaimana diakui oleh 66,67% persen KRT Perempuan miskin yang mendapatkan jumlah bantuan raskin kurang dari jumlah yang seharusnya, yaitu 15 kg, hanya terdapat 33,33 persen yang menyatakan menerima bantuan raskin sesuai dengan jumlah yang diharuskan. Semua jenis bantuan yang diterima diakui membantu mereka dalam mengatasi kesulitan hidup, meskipun diakui tidak sesuai dengan kebutuhan.

Beberapa KRT perempuan miskin mengaku tidak mendapatkan bantuan akibat proses perceraian dengan suaminya yang tidak tuntas. Talak yang dijatuhkan suami, atau gugat cerai yang dilayangkan ternyata tidak diikuti secara formal dan dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil maupun Pengadilan Agama. Status identitas hukum yang menggantung ini berakibat fatal karena dokumen yang dimiliki oleh perempuan yang harusnya berubah status kependudukannya, namun tidak dapat dipenuhi. Beberapa alasan yang dikemukakan adalah pengurusan akta cerai terhambat biaya, dan sebagian mengaku tidak mengerti bahwa status cerai berdampak pada status kependudukan.

Sebagaimana diketahui, berbagai program penggulungan kemiskinan ataupun program aksi cepat covid-19, ditujukan kepada keluarga. Ada beberapa program yang ditujukan untuk individu namun dengan syarat khusus, misalnya bantuan untuk UMKM, atau bantuan kerja pagi pekerja yang tercatat sebagai anggota BPJS. Artinya mereka yang tidak tercatat tidak akan mendapatkan bantuan tersebut.

Sebagian besar KRT perempuan bukan penerima bantuan yang bersifat individu, mereka termasuk target sebagai masyarakat miskin. Upaya yang mereka tempuh adalah dengan melakukan berbagai usaha yang dianggap memiliki peluang menghasilkan uang. Beberapa usaha yang dilakukan adalah berjualan makanan, beralih usaha dari usaha sendiri ke buruh, berjualan sayur mayur di pasar, buruh angkut, buruh cuci dan seterika, dan membuat masker.

Usaha ini tak sepenuhnya berhasil, mereka melakukan perubahan strategi bertahan hidup berulang-ulang dengan berbagai jenis usaha yang mereka tekuni. Kemampuan untuk melakukan perubahan inilah yang mengagumkan. Mereka mengaku upaya itu dilakukan dengan *effort* besar dan sangat keras, karena kompetitor yang dihadapi oleh mereka bukan sekedar sesama orang miskin namun bersaing dengan pemilik modal besar dan akses yang luas.

Upaya-upaya besar yang dilakukan KRT perempuan miskin ini untuk menguatkan ketahanan keluarga khususnya dalam hal pangan. Bagi mereka ketahanan pangan adalah prioritas, sedangkan kebutuhan lain menjadi nomor kedua. Mereka menyadari bahwa kualitas pangan bagi keluarga saat pandemic covid-19 sangat penting. Ditengah keterbatasan ekonomi yang dimiliki, mereka berusaha keras untuk menyediakan pangan bagi keluarga dengan standar minimal yang mampu disediakan. Menurut pengakuan dari beberapa KRT penyediaan pangan keluarga meningkat kualitasnya. Sebelum covid-19 mereka makan apa adanya, yang penting tersedia nasi dan sambal, sekarang pola makan berubah.

Mereka berupaya mentaati anjuran pemerintah, minimal sayur dan protein nabati dipenuhi, jikapun mereka menyediakan protein hewani, maka kemampuan mereka adalah menyediakan telur, ikan asin, dan ayam khususnya ayam broiler bagian kepala dan ceker. Rata-rata pengeluaran untuk penyediaan makan keluarga berkisar 20-30 ribu per hari.

Prioritas lain yang disiapkan adalah kesehatan keluarga. Mereka melakukan secara tradisional yaitu menyediakan jamu dari empon-empon yang paling murah yaitu kunyit, daun sereh dan sedikit jahe. Beberapa Perguruan Tinggi dan LSM menyalurkan bantuan empon-empon kepada mereka walaupun terbatas namun dapat digunakan untuk mendukung kesehatan keluarga. Anjuran penggunaan protokol kesehatan yaitu menggunakan masker tidak semua ditaati. Alasan sulit bernafas jika bekerja menjadi alasan klasik, namun mereka tetap menggunakan masker jika berada di luar lingkungan rumah.

Persoalan yang dihadapi dalam menyediakan pangan yang berkualitas adalah daya jangkau menyediakan pangan secara berkelanjutan. Mereka pesimis jika pandemi terus berlangsung, maka kemampuan menyediakan keamanan pangan bagi keluarga akan terancam. Ketidakmampuan bersaing diakui sebagai kendala yang berat. Beberapa orang mengaku memiliki kemampuan untuk sedikit menguasai teknologi informasi berkat bantuan anak-anaknya, namun sebagian besar menyatakan melakukan usaha berdasarkan pada intuisi bisnis yang selama ini dilakukan. Jika tidak mampu bertahan dengan usaha yang dilakukan, maka alternatif yang akan diambil adalah menjadi buruh, atau mengajak keluarga terlibat dalam usaha yang ditekuni.

Ketahanan pangan keluarga ditentukan oleh kapasitas ekonomi rumah tangga. Masa pandemi covid-19 ini bagi KRT perempuan miskin adalah masa akrobatik ekonomi keluarga, yaitu kebutuhan akan modal usaha sebagai landasan untuk meneruskan usaha yang selama ini ditekuni. Persoalan modal usaha tidak sederhana, selama ini dukungan modal didapat dari keluarga besar dan hutang kepada tetangga atau pada tengkulak. Ketergantungan ini semakin menghimpit manakala mereka tidak mampu keluar dari kemiskinan. Beberapa yang mendapatkan bantuan dari pemerintah bisa sedikit bernafas, namun bagi yang tidak mendapatkan bantuan, mereka bergantung uluran tangan tetangga atau keluarga jauh.

Ikatan kekerabatan antar tetangga, dan keluarga jauh inilah menjadi katup penyelamat bagi yang benar-benar miskin dan terpuruk. Meskipun mereka risi atas bantuan tersebut, namun suka atau tidak suka bantuan tersebut harus diterima. Mereka yang mendapatkan uluran tangan dari tetangga dan kerabat jauh, juga dari yayasan sosial adalah mereka yang sudah tidak mampu bertahan.

Persoalan lain yang harus dihadapi adalah dalam hal pengasuhan keluarga. Penyediaan pangan keluarga yang berkualitas ternyata harus diimbangi dengan pola asuh yang pada pandemi ini tidak lagi dapat sepenuhnya terpenuhi. Ruang publi dan domestik saling tarik menarik, yang pada akhirnya KRT perempuan miskin harus memilih ruang publik sebagai jalan menyediakan pangan berkualitas. Pengasuhan anak diserahkan sepenuhnya kepada anak-anak yang lebih tua, orang tua, kerabat dan tetangga. Tidak heran bahwa muncul kekerasan dalam rumah tangga terutama kekerasan psikis akibat pola asuh yang dilimpahkan tersebut. Temuan penelitian ini 3 dari 10 dari mereka mengalami kekerasan.

Memahami temuan-temuan diatas menunjukkan bahwa persoalan pangan berkaitan erat dengan status gender. Fenomena sosial berkaitan dengan psikologis yang dibangun secara sosial, selaras dengan budaya yang membentuk identitas gender dan peran gender (Yunger, Carver, & Perry, 2004). Peran gender yang berpotensi, ditentukan oleh budaya dan atau stereotip telah meningkatkan kerentanan baik pada laki-laki maupun perempuan (Dale et al., 2014; Galdi, Maass, & Cadinu, 2014; Jewkes & Morell, 2010). Perempuan dan anak perempuan miskin dominan

mengalami stereotip universal mencakup pengelolaan keluarga, pengasuhan fisik dan emosional orang lain. Hal ini menunjukkan kepatuhan dalam hubungan dengan masyarakat (Brody et al., 2014); dan memprioritaskan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan sendiri (Louw & Louw, 2009; Jack & Dill, 1992; Yordania, 2013; Prentice & Carranza, 2002)<sup>(13)</sup>.

Peran tradisional seperti itu dapat menempatkan perempuan pada risiko kerentanan yang lebih parah, baik kerentanan sosial, ekonomi, budaya termasuk kerentanan dalam kekerasan. Stereotip gender perempuan pasif dan tunduk dalam relasi sosial masyarakat menciptakan ketidaksetaraan dan menempatkan perempuan pada risiko yang selama ini telah diterima. Ini menunjukan bahwa perempuan memiliki ketahanan psikologis yang mampu mengatasi persoalan yang dihadapi.

Ketahanan psikologis secara signifikan terkait dengan kepuasan dengan hidup dan berbanding terbalik dengan tekanan psikologis. Faktor ketahanan mendorong munculnya komitmen untuk hidup dan menguatkan kesejahteraan yang diimpikan dalam keluarga. Faktor tantangan memberikan kontribusi bahwa orientasi positif ke masa depan adalah aspek yang signifikan. Adaptasi terhadap kehilangan akibat perceraian membuat mereka harus berdamai dengan tuntutan, tantangan termasuk kerentanan sebagai peristiwa kehidupan yang signifikan<sup>(14)</sup>.

Ketahanan umumnya dianggap menggambarkan kualitas menjadi lenting (Dyer dan McGuinness, 1996), dan berlaku untuk individu yang berhasil mencapai hasil psikologis yang positif meskipun menghadapi keadaan kehidupan negatif yang serius (Rutter, 2006). Ketahanan sebagai kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berubah atau kemampuan untuk pulih dengan baik setelah kesulitan, dan dikaitkan dengan atribut pribadi seperti sifat tahan banting dan ketabahan (Olsson et al., 2003; Earvolino-Ramirez, 2007). Analisis konsep daya lenting mengidentifikasi sejumlah atribut yang menentukan seperti memiliki rasa determinasi diri, harga diri positif, rasa humor, dan adanya hubungan positif (Earvolino-Ramirez, 2007). Istilah ini tidak selalu menyiratkan kekebalan terhadap efek buruk dari keadaan kehidupan yang penuh tekanan melainkan kemampuan untuk menunjukkan perkembangan normal dalam kondisi sulit<sup>(15)</sup>.

Inilah yang terjadi pada KRT perempuan miskin yang memiliki kemampn bertahan yang kuat ditengah banyaknya tekanan yang menghampirinya. Daya lenting dalam keluarga mengacu pada karakteristik, dimensi dan properti keluarga yang membantu menjadi tangguh dalam menghadapi perubahan dan adaptif dalam menghadapi situasi krisis. Ketahanan umumnya dipahami memiliki dua komponen yaitu (1) adanya kemampuan menghadapi risiko atau kesulitan, dan (2) individu atau keluarga berhasil melakukan adaptasi positif dalam menghadapi tantangan<sup>(15)</sup>. Temuan penelitian menunjukan hal yang sama, dukungan keluarga dan lingkungan sosial memberikan kontribusi mereka keluar dari situasi pandemic di era new normal.

Ketergantungan kepada keluarga dekat seperti anak perempuan, dipandang sebagai "penolong," yang harus membantu kegiatan rumah tangga. Dampak buruknya adalah prioritas membantu keluarga telah menyisihkan prioritas pendidikan. Studi terbaru tentang perempuan di tingkat universitas di Kamerun juga mengungkapkan bahwa status perkawinan, melahirkan anak, tanggung jawab keluarga, budaya dan tradisi, otonomi keuangan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan berkontribusi pada kinerja yang buruk dalam pendidikan (Yebe dan Meno 2015). Faktor-faktor tersebut juga berkontribusi terhadap tingginya angka putus sekolah perempuan dan membuat perempuan kurang kompetitif di pasar kerja menderita marginalisasi serta diskriminasi, karena status sosial mereka<sup>(16)</sup>.

Berbagai hal temuan diatas perlu *affirmative actions* baik berupa kebijakan publik maupun aksi nyata untuk menguatkan ketahanan pangan dalam keluarga. Kemampuan

perempuan dengan kekuatan daya lenting walaupun tidak stabil telah memberikan kontribusi dalam penyediaan pangan keluarga yang aman. Merujuk hasil penelitian sejenis di Provinsi Jambi ternyata faktor sosial ekonomi berpengaruh signifikan terhadap ketahanan pangan<sup>(17)</sup>.

Model kebijakan publik untuk KRT perempuan harus bersifat partikularistik. Model yang dibangun melibatkan lingkungan sosial, dan membuka peluang bagi KRT perempuan tanpa identitas hukum untuk mendapatkan perlakuan yang sama. Sementara itu aksi-aksi nyata dapat dibangun dalam dua perspektif yaitu aksi praktis dan aksi strategis. Aksi praktis dapat berupa bantuan langsung yang selama ini belum pernah didapatkan, seperti bantuan beras yang mencukupi dalam satu bulan, lauk pauk kering yang dapat bertahan seperti ikan asin atau telur asin, dan bantuan modal untuk mereka bangkit dan berusaha.

Aksi strategis dapat berupa asistensi termasuk perlakuan khusus dalam memenuhi identitas hukum yang dapat berguna untuk membuka akses dalam memperoleh sumberdaya yang dibutuhkan. KRT perempuan miskin dan keluarga harus dapat dihindarkan dari kekerasan baik berbasis gender, keluarga dan sosial, terutama adalah memarginalisasikan mereka pada aras kerentanan yang tidak dapat ditolong.

Langkah-langkah mengatasi keamanan pangan dalam keluarga di new normal dapat dilakukan dengan meninjau kembali status rumah tangga yang dikepalai perempuan tanpa identitas hukum. Pengalaman di Brasil tahun 2009 menunjukkan wawasan baru tentang penentu kualitas hidup menggunakan ukuran kerawanan pangan yang mengabaikan pengaruh kemiskinan, usia, pendapatan, pendidikan, tempat tinggal, dan status gender. Berbagai indikator komposisi internal rumah tangga berpengaruh signifikan secara statistik dan *non-linier* terhadap kerawanan pangan. Preferensi perempuan dalam pengeluaran dan konsumsi cenderung memiliki efek positif yang lebih besar tentang kesejahteraan anggota rumah tangga lainnya. Pengalaman Brasil ini menunjukkan bahwa walaupun perempuan mengalami stresor seperti lebih intens daripada laki-laki namun memiliki kemampuan untuk mensejahterakan keluarga karena memiliki daya lenting yang tinggi dalam menguatkan keamanan pangan dalam keluarga<sup>(18)</sup>.

## SIMPULAN

Kepala Rumah tangga Perempuan miskin di era new normal mengalami tantangan yang cukup berat dalam mengelola rumah tangga dengan jaminan keamanan pangan keluarga yang memadai. Kondisi kemiskinan yang menghimpit telah menjadikan ruang lingkup sosial menyempit akibat aksesibilitas yang terbatas atas status gender yang melekat pada diri perempuan. Kondisi serba terbatas menunjukkan ketidakmampuan dalam mengatasi situasi yang membutuhkan kekuatan yang berbeda dari kondisi normal sebelum pandemi covid-19. Kerentanan yang dialami bukan hanya kemiskinan, namun status hukum sebagai kepala keluarga telah menjadi penghalang dalam mengakses sumberdaya lain yang dibutuhkan.

Meskipun dalam berbagai keterbatasan, ternyata secara sosial ekonomi KRT perempuan miskin memiliki daya lenting yang baik. Kemampuan melenting ini dipengaruhi beberapa faktor yaitu (1) kemampuan menghadapi risiko atau kesulitan, dan (2) individu atau keluarga berhasil melakukan adaptasi positif dalam menghadapi tantangan. Faktor lain dari penelitian ini ditemukan yaitu dukungan keluarga, komunitas dan lingkungan sosial yang memberikan kontribusi mereka keluar dari situasi pandemi di era new normal.

Pemerintah, pemerintah daerah harus melakukan afirmasi kebijakan publik yang khusus bagi KRT perempuan, yang dapat dimulai dari pemetaan KRT perempuan miskin sehingga intervensi dapat lebih spesifik. Membangun partisipasi sosial di lingkungan KRT perempuan miskin, dapat menghindari marginalisasi dan stereotype serta menguatkan keberdayaan mereka.

Mendorong LSM, Perguruan Tinggi, Yayasan Sosial, Swasta, dan para dermawan melakukan aksi praktis dan strategis. New normal harus dipahami sebagai upaya lompatan yang berbeda dengan situasi normal, oleh karena itu meninjau kembali status rumah tangga yang dikepalai perempuan tanpa identitas hukum sebagai prasyarat penerimaan bantuan adalah penting.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada para KRT perempuan miskin yang bukan saja memberikan informasi yang sangat berharga, namun juga menginspirasi peneliti untuk membantu para KRT perempuan miskin dalam menguatkan ketahanan keluarga. Terima kasih juga wajib peneliti sampaikan kepada Rektor, Dekan Fisip, Kepala Lemlit, Kepala LPM, Universitas 17 Agustus 1945, atas banyak kesempatan untuk melakukan penelitian dan penulisan jurnal sebagai bagian dari pengembangan diri bagi dosen. Kepada panitia, editor penyelenggara seminar nasional ini, peneliti juga menyampaikan terima kasih setulusnya. Kepada semua kontributor dalam penulisan ini peneliti menyampaikan terima kasih yang sangat dalam. Semoga seluruh upaya ini dapat berguna bagi sesame, aamiin.

### DAFTAR PUSTAKA

- Satgas Covid19. Peta Sebaran | Satgas Penanganan COVID-19 [Internet]. 2020. Available from: <https://covid19.go.id/peta-sebaran>
- Satgas Covid jateng. Jateng Tanggap COVID-19 [Internet]. 2020. Available from: <https://corona.jatengprov.go.id/data>
- Suryahadi A, Al Izzati R, Suryadarma D. The Impact of COVID-19 Outbreak on Poverty: An Estimation for Indonesia (Draft) [Internet]. Vol. April, SMERU Working Paper. 2020. Available from: <http://smeru.or.id/en/content/impact-covid-19-outbreak-poverty-estimation-indonesia>
- BPS. STATISTIK Profil Kemiskinan di Indonesia. 2020;(56):1–12. Available from: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html>
- BPS. Tabel Perkembangan UMKM BPS [Internet]. 2016. Available from: <https://www.bps.go.id/statictable/2014/01/30/1322/tabel-perkembangan-umkm-pada-periode-1997--2013.html>
- Dani Sugiri. Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Dampak Pandemi Covid-19 2. Fokus Bisnis Media Pengkaj Manaj dan Akunt Vol 19, No 1, July 2020 [Internet]. 2020;2020. Available from: <http://journal.stieputrabangsa.ac.id/index.php/fokbis/index>
- Nassaji H. Qualitative and descriptive research: Data type versus data analysis. Lang Teach Res. 2015;19(2):129–32.
- Yeasmin S, Rahman.K.F. ' Triangulation ' Research Method as the Tool of Social Science Research. Bup J [Internet]. 2012;1(1):154–63. Available from: <http://www.bup.edu.bd/journal/154-163.pdf>
- Pemerintah. Undang-Undang nomor 18 tahun 2012. 2012.
- Lendi Ageng Kurnia DDI. Food independence determinant (Rice) In Supporting The Availability Of National Rice. J Ekon Pembang [Internet]. 2019;17(31):55–72. Available from: [file:///Users/indrakertati/Downloads/Food\\_independence\\_determinant\\_Rice\\_In\\_Supporting\\_T.pdf](file:///Users/indrakertati/Downloads/Food_independence_determinant_Rice_In_Supporting_T.pdf)
- Balakrishnan R. Rural women and food security in Asia and the Pacific : [Internet]. Bangkok Thailand: FAO Bangkok; 2005. 1–96 p. Available from: <http://www.fao.org/3/a-af348e.pdf>

- Pemerintah. PP 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan. 2019.
- Jefferis T, Theron L. Explanations of resilience in women and girls: How applicable to black South African girls. *Womens Stud Int Forum*. 2018 Mar 1;
- O'Rourke N. Psychological resilience and the well-being of widowed women. *Ageing Int*. 2004 Sep 1;29:267-80.
- Lennon S, Heaman M. Factors associated with family resilience during pregnancy among inner-city women. *Midwifery*. 2015 Jun 1;31.
- Nkemnyi MF, Fombu C, Kwobenyi N, Mumbang C. AN ASSESSMENT OF THE ROLE OF WOMEN IN DEVELOPMENT AND POVERTY ALLEVIATION IN CAMEROON. In 2017.
- Hardiani H, Junaidi J, Prihanto P. Food Security of Urban Female-headed Households: Case in Jambi Province, Indonesia. *Turkish J Agric - Food Sci Technol*. 2018 Sep 15;6:1229.
- Felker-Kantor E, Wood C. Female-headed households and food insecurity in Brazil. *Food Secur*. 2012 Dec 1;4.